

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
SEMARANG MENURUT PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**Oleh :
Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih**

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan sampah dilatar belakangi oleh tingginya jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Semarang. Produksi sampah di kota Semarang per harinya mencapai 800 ton/hari dengan daya tampung TPA sebesar 400 ton/hari. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk kota Semarang sekitar 1.5 juta jiwa dan juga menjadi salah satu tujuan dari urbanisasi. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya produksi sampah yang diakibatkan oleh masyarakatnya. Untuk menangani masalah tersebut Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan Perda Pengelolaan Sampah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perda melalui media elektronik, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pengelolaan Sampah.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
SEMARANG MENURUT PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**Oleh :
Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih**

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Waste management policy based on the event by the high number of heaps of garbage that exists in the city of Semarang. Production of garbage in the city of Semarang per day reached 800 tons/day with a capacity of landfill of 400 tons/day. This happens because with the increase of the population of Semarang city around 1.5 million inhabitants and is also one of the goals of the urbanization. As a result of such activities is the increased production of waste caused by the people. To deal with the problem of local government issued regulation Semarang city waste management areas number 6 in 2012 about waste management that aims to improve public health and the quality of the environment as well as made the waste as a resource. The purpose of this research is to find out how the implementation and the factors that encourage and inhibit the implementation of waste management Policies according to the Semarang area number 6 in 2012.

Research methods used in this research is qualitative research methods are descriptive, i.e. by providing a comprehensive overview of the focus of the research. The results of this research show that the implementation of waste management policies are not fully managed to reduce the number of existing middens. In practice there are still various obstacles such as, communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Recommendations that can be given to the problem of socialization such as local regulations through electronic media, the addition of human resources and facility cleanliness, training, motivation for employees as well as the establishment of a special section dealing with communities who break the rules are already set.

Key words: Policy Implementation, waste management.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir seluruh negara-negara di dunia mempunyai permasalahan di dalam negaranya. Permasalahannya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, kependudukan, sosial dan budaya, dan lingkungan. Di Indonesia masalah lingkungan juga menjadi salah satu permasalahan pokok. Masalah lingkungan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia adalah Pencemaran air, pencemaran udara, Pencemaran tanah, serta masalah sampah.

Berdasarkan berita dari situs <http://jateng.tribunnews.com> (diakses tanggal 4 Desember 2013) produksi sampah di kota Semarang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelola kebersihannya. Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang volumenya bertambah rata-rata 750 ton/hari. Namun akses jalan menuju lokasi TPA, penataan lokasi hingga pengelolaan sampahnya tidak memadai. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah tersebut, yang pada akhirnya berdampak terhadap manusia dan lingkungan.

Sampah yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk di kota Semarang

sebagian besar merupakan sampah organik yang mempunyai sifat mudah membusuk menjadi kompos. Sampah lainnya berupa sampah anorganik yang berupa plastik, kertas, kain dan lain-lain. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, komposisi sampah di dominasi oleh sampah organik dengan persentase sebesar 78,34%, sedangkan sisanya 21,66% merupakan sampah anorganik. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kebersihan kota Semarang tidak hanya sebatas pengadaan sarana prasarana tetapi juga dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang, penulis memilih judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”**

B. TUJUAN

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Semarang.

C. TEORI

Pengertian administrasi dan publik menurut tokoh diatas definisi dari administrasi publik menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan

mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Shafritz dan Russell (1997: 47) memberikan definisi kebijakan publik yang paling mudah diingat dan mungkin paling praktis yaitu *whatever a government decides to do or not to do*. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari pelaksanaan suatu kebijakan yang buat oleh pemerintah setelah melalui tahapan-tahapan tertentu oleh para pembuat kebijakan.

Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Semarang dapat dilihat melalui faktor pendorong dan penghambat yang ada dalam George Edward III yaitu :

1. Komunikasi,
2. Sumber daya,
3. Disposisi, dan
4. Struktur birokrasi

D. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Situs penelitian ini adalah wilayah Kota Semarang yang telah memperoleh layanan kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif yang dilakukan dengan cara : (a). Mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara dan observasi dari lapangan. (b). pengolahan data yaitu dengan memeriksa kembali data yang diperoleh dan mencocokkan menurut kategori masing-masing. (c). dibuatlah suatu kesimpulan berdasarkan pada informasi dari narasumber. Sedangkan Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dapat me-recheck hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

E. PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2013 menurut dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang timbulan sampah yang dihasilkan per harinya mencapai sekitar 800 ton/hari dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 750 /hari dengan daya tampung TPA sekitar 400 ton/hari. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per harinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang membuat suatu Kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat kota Semarang adalah sampah permukiman atau rumah tangga dengan persentase sebesar 77.89% sampah organik yang pengangkutannya dilaksanakan 2-4 kali sehari menuju TPA JAtibarang.

Pengurangan sampah termasuk pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah di Kota Semarang saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut ada yang dikelola oleh DKP dan ada yang dikelola oleh perusahaan dan pemulung. Hal ini dikarenakan pembatasan jumlah timbulan sampah harus berasal dari sumber sampah dan pemerintah hanya sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam hal pembatasan sampah tersebut. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah DKP mendirikan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang ada sekitar 15 TPST yang aktif beroperasi di Kota Semarang. Cara lain yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Metode 3R dilakukan untuk mengurangi sampah dan sebagai salah satu cara dalam hal pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah yang ada. Sedangkan untuk metode bank sampah, dinas memberikan bantuan peralatan teknis berupa tong sampah, becak sampah dan alat timbangan untuk setiap Kecamatan. Sedangkan untuk pendauran ulang sampah,

pemerintah hanya dapat melakukannya pada sampah organik dengan membuat pupuk kompos sedangkan untuk sampah anorganik belum ada tindak lanjutnya. Hal tersebut seharusnya juga dijadikan agenda pemerintah untuk pendauran ulang sampah anorganik.

Kegiatan Pemanfaatan kembali sampah seperti kegiatan penggunaan kembali sampah kemasan untuk fungsi yang sama belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut hasil observasi, masih banyak terdapat sampah-sampah kemasan yang ada di TPS. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan perannya dalam mendukung berhasilnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Selanjutnya yaitu tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah. kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dapat dibantu oleh masyarakat. Dalam kegiatan pengumpulan sampah menurut hasil observasi masih terdapat masyarakat yang tidak mengumpulkan sampah di TPS dan membuang sampah sembarangan disekitar tempat tinggalnya atau di sungai. Sedangkan untuk pengolahan akhir sampah di TPA dilakukan oleh dinas selain itu juga mendapat bantuan dari PT. Narpati. PT. Narpati adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota Semarang untuk mengolah sampah menjadi kompos, bahkan tidak hanya kompos tetapi juga berupa *granula* yang berbentuk butiran-butiran. Sampah yang dapat diolah oleh PT. Narpati hanya sekitar

250 ton/hari dari total 400 ton/hari sampah yang masuk TPA.

Sistem pengolahan sampah yang ada di Kota Semarang adalah dengan menggunakan metode *control landfill* yaitu dengan menimbun sampah dengan lapisan tanah setiap tujuh harinya. Pengelolaan sampah di Kota Semarang tentunya mempunyai hambatan atau kendala-kendala dalam hal pelaksanaan implementasinya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan peranannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang.

B. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Semarang

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat dilihat

menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang memiliki empat faktor yang dapat mengukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

1 Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang akan tercapai apabila tujuan dan ukuran dasar kebijakan dikomunikasikan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang pemerintah daerah menggunakan cara sosialisasi yang dilakukan di kecamatan-kecamatan Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup ataupun lembaga lingkungan lainnya dan juga dengan membagikan buku-buku terkait dengan informasi perda pengelolaan sampah. Dan sosialisasi tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Cara lain yang dilakukan dengan menggunakan media seperti menginformasikan Perda pengelolaan sampah melalui media internet sudah dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tentang adanya perda tersebut. Namun ketepatan dari penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang ditujukan kepada masyarakat tampaknya belum sepenuhnya berhasil, karena menurut hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Kota Semarang, mereka belum sepenuhnya paham mengenai

pengelolaan sampah, karena menurut mereka hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

2 Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sumber daya manusia termasuk kualitas dan kuantitasnya. Menurut pemaparan dari para informan terkait dengan kuantitas sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada masih kurang dan perlu penambahan jumlah petugas kebersihan agar pelayanan kebersihan dapat berjalan secara optimal. Namun terlepas dari kurangnya sumber daya yang dimiliki, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka saling membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan dalam menjalankan tugas. Selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Kota Semarang dalam menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dinilai masih kurang. Dari semua sumber daya yang diperlukan, baik dari sumber daya manusia, ataupun sarana dan prasarana memerlukan dana yang cukup besar agar semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah bisa tercapai. Selama ini anggaran yang digunakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di

Kota Semarang berasal dari dana APBD Kota Semarang. Selain dari APBD sumber dana lain adalah berasal dari retribusi pelayanan kebersihan yang dalam penarikannya dilakukan oleh PDAM kemudian disetorkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk digunakan dalam pengelolaan sampah.

3 Disposisi

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) komitmen aparat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Komitmen dari petugas lapangan berdasarkan hasil observasi penulis, mereka sudah mengetahui tugasnya dengan baik dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, namun didalam prakteknya masih ditemukan beberapa petugas lapangan ataupun pegawai yang dalam menjalankan tugasnya belum optimal, seperti belum sepenuhnya bekerja di saat jam kerja. Dalam menjaga komitmen yang ada saat ini, para petugas lapangan yang melanggar akan dikenakan sanksi bagi yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya seperti kepada para petugas kebersihan yang dalam menjalankan tugasnya didapati kurang rajin dan sering terlambat untuk bekerja mendapat sanksi berupa teguran secara lisan ataupun tertulis.

Respon atau tanggapan implementor terhadap suatu kebijakan pengelolaan sampah menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh implementor terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah cukup baik. Hal ini karena kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dapat menjadi acuan bagi implementor dalam menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sedangkan untuk respon pemerintah daerah dalam menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat, seperti mengenai kurangnya atau tidak seimbangnya sarana dan prasarana dengan volume sampah yang ada atau mengenai keterlambatan petugas kebersihan dalam mengangkut sampah. menanggapi hal tersebut pemerintah daerah dapat langsung menangani masalah yang ada di masyarakat, serta dengan pemberian sanksi bagi petugas yang lalai dalam bekerja.

4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. struktur birokrasi yang ada pada bidang Operasional Dinas kebersihan dan Pertamanan, susunan birokrasi yang ada dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan bidang Operasional tidak terlalu panjang dapat memudahkan dalam mengkoordinir petugas kebersihan dari Kasie, staff sampai mandor dan penyapu jalan dalam menjalankan

implementasi pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah. Jumlah timbulan sampah yang ada tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kendala-kendala yang ada pada struktur birokrasi saat ini adalah belum adanya bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. Seharusnya terdapat bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah serta perlu adanya tim yustisi seperti yang sudah diterapkan oleh kota Surabaya dalam hal penanganan sampah bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga ketika melakukan kegiatan dilapangan bisa optimal dan terkoordinir sesuai bagiannya masing-masing.

5 PENUTUP

KESIMPULAN

- A. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan

pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R dan bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena kurangnya keikutsertaan dan kurang pedulinya masyarakat terhadap Jumlah timbulan sampah yang ada sehingga setiap tahunnya masih mengalami kenaikan. Baru sedikit masyarakat yang peduli tentang mengolah sampah di lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mengatakan bahwa masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di daerah Jomlang dan Sampangan. Masyarakat di sana sudah mau mengolah sampah rumah tangga yang mereka miliki dengan menjadikannya pupuk kompos dan berbagai kerajinan tangan. Sedangkan untuk pengangkutan sampah ke TPA juga belum optimal, karena dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya belum bisa terangkut semua sesuai dengan data yang di dapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa produksi sampah harian di Kota Semarang mencapai 800 ton/hari, namun yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 750 ton/hari dengan

kapasitas di TPA hanya 400 ton/hari.

B. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang juga memiliki faktor-faktor Pendorong dan Penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang akan berhasil apabila dikomunikasikan dengan baik. Dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang intensif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan. Selain dari sosialisasi secara langsung melalui kecamatan dan pembagian buku-buku/cetakan Perda pengelolaan sampah, tidak ada upaya lain seperti pemasangan baliho atau pamflet di jalan-jalan untuk mensosialisasikan perda tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kota Semarang seperti sumber daya

manusia yang ada juga dirasa belum cukup untuk melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan juga sumber daya lain yang dibutuhkan berupa sarana dan prasarana penunjang kebersihan dalam hal pengangkutan dan pengolahan sampah juga perlu adanya penambahan untuk mendukung berhasilnya implementasi pengelolaan sampah di Kota Semarang.

3. Disposisi
Disposisi yang ada saat ini terkait dengan komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan dapat dikatakan cukup bagus, namun dalam prakteknya masih terdapat petugas pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk respon pemerintah dalam menanggapi keluhan dari masyarakat juga cukup baik, karena pemerintah dapat turun langsung untuk menangani masalah yang ada tentang pengelolaan sampah tersebut.
4. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang memiliki struktur yang tidak terlalu

panjang namun belum sepenuhnya efektif. Karena masih terdapat kekurangan mengenai bagian-bagian khusus dalam kegiatan pengurangan dan penanganan serta dalam hal pengawasan bagi yang melanggar sehingga implementasi pengelolaan sampah kurang optimal.

Diluar dari faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi pengelolaan sampah di Kota Semarang, yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Masyarakat yang sadar dan peduli akan lingkungan dan mau ikut mengolah sampah akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada.

SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Komunikasi
Dalam hal sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah bisa dengan memasang baliho ataupun poster mengenai kesadaran akan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum, dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bisa lebih sering dilakukan dan sosialisasi melalui media elektronik seperti di televisi dan radio agar implementasi

- pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
2. Sumber Daya
Perlu adanya penambahan petugas kebersihan dilapangan dan penambahan peralatan kebersihan dan kendaraan berat, karena saat ini kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak semua dalam kondisi yang baik atau rusak.
 3. Disposisi
Meningkatkan komitmen petugas kebersihan dan aparat pemerintah dengan cara memberikan motivasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal ketika bekerja.
 4. Struktur Birokrasi
Perlu adanya penambahan bagian-bagian khusus dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta adanya bagian atau tim khusus yang menangani masyarakat yang melanggar saat membuang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Keraf, A. Sonny. 2010. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Parson, Wayne. 2008. *Publik policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sastrawijaya, T.A. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

- Sudradjat, H, R. 2007. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

II. Sumber Lain

- <http://jateng.tribunnews.com>
Dunduh pada tanggal 4 Desember 2013

- <http://semarangkota.bps.go.id/>
Diunduh pada tanggal 15 desember 2014
- <http://www.suaramerdeka.com>
Diunduh pada tanggal 15 Desember 2014
- Data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang tahun 2011.
- Perda Kota Semarang No. 6 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.